



Judul : Revisi Terbatas UU Pilkada Tidak Ideal
Tanggal : Jumat, 06 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Revisi Terbatas UU Pilkada tidak Ideal

RENCANA untuk memajukan jadwal Pilkada 2024 dari November 2024 ke September 2024 lewat revisi Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada dinilai tidak ideal. Hanya ada waktu kurang setahun dari sekarang jika pemerintah ingin merealisasikan hal tersebut.

“Sangat tidak ideal merevisi undang-undang mepet dengan tahapan penyelenggaraan pilkada,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Ia menegaskan salah satu

prinsip penyelenggaraan pemilu ialah kepastian hukum. Oleh karena itu, wacana untuk merevisi UU pilkada saat ini menjadi sorotan terkait dengan mepetnya waktu. Belum lagi, Khoirunnisa melanjutkan, jika terpotong masa reses di parlemen.

Menurutnya, publik perlu mendapat penjelasan soal wacana memajukan jadwal Pilkada 2024. Khoirunnisa meyakini percepatan jadwal pilkada bakal berdampak pada impitan tahapan Pemilu 2024. Padahal, KPU sebagai penyelenggara sedang mempersiapkan penetapan daftar calon tetap anggota legislatif dan

bersiap untuk kampanye.

“Belum lagi soal kepastian anggarannya karena beberapa waktu lalu sempat ada berita bahwa belum semua daerah menyiapkan anggarannya karena anggaran pilkada dari APBD,” tandasnya.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyebut realisasi percepatan Pilkada 2024 dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

“Revisi UU Pilkada waktunya enggak sempat karena melibatkan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah.”

Sebelumnya, wacana revisi

terbatas UU Pilkada muncul setelah Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10).

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyebut revisi terbatas UU Pilkada disebut menjadi salah satu opsi bentuk hukum untuk mengubah jadwal itu dan bukan melalui perppu. Penerbitan perppu bakal memunculkan spekulasi bahwa Presiden memiliki kepentingan.

“Itu akan dibicarakan DPR atas inisiatif legislatif karena (pilkada) ini kan kepentingan bersama,” ungkap Budi. (Sru/Tri/P-3)